BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah menjamin seluruh warganya mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat satu yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.¹ Untuk itu, tidak ada lagi alasan adanya anak yang putus sekolah karena persoalan apapun. Bahkan UUD juga mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan tingkat dasar. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Karena basis strategis pembangunan adalah pendidikan. Oleh karena itu, menjadi tugas negara untuk mengatur supaya terjadi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara sekaligus kebutuhan mendasar dalam pembangunan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya akses terhadap pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Indonesia memiliki peraturan, kebijakan, dan perundang-undangan pendidikan yang lengkap. Meskipun demikian, seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang semestinya ketika diterapkan.

¹ UUD 1945

Sistem pendidikan suatu negara mencerminkan tingkat kemajuan dan perkembangannya, karena pendidikan merupakan elemen krusial yang menentukan kapasitas individu dalam menghadapi tantangan globalisasi serta persaingan internasional. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang unggul cenderung mampu mencetak sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan inovatif. Kontribusi tersebut berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing global. Oleh karena itu, mewariskan pendidikan yang bermutu kepada generasi muda menjadi suatu keharusan strategis dalam upaya membangun peradaban bangsa di masa depan..

Dapat diketahui bahwa negara yang mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah yang memulai pembangunan Pendidikan, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran. Sebaliknya, negara-negara yang kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan sistem pendidikannya cenderung mengalami keterlambatan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terdidik. Di Indonesia, lambatnya laju pembangunan dapat dijadikan indikator lemahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mencerminkan masih rendahnya efektivitas sistem pendidikan nasional.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor kunci dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang pesat. Dalam konteks ini, setiap negara dituntut untuk secara proaktif mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal, karena tidak ada alternatif lain selain beradaptasi dan berinovasi demi menjaga eksistensi dan daya saing di tingkat global. Pendidikan, pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan berbagai keterampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (*life-long process*), dari generasi ke generasi.²

Pendidikan memegang peran sentral dalam arah pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam membentuk individu yang tangguh, dinamis, produktif, terampil, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pengembangan SDM tidak dapat berdiri sendiri, perlu didukung oleh kolaborasi yang erat antara dunia industri dan talenta global. Strategi pembangunan SDM ini sejalan dengan salah satu dari tujuh agenda pembangunan nasional 2020–2024, yakni peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.³

Kemajuan suatu negara dapat dinilai dari tingkat pendidikannya. Pada dekade 1960-an, Brasil menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan, terutama tingginya angka buta huruf di kalangan penduduknya. Tingginya angka

² Rizal. Moh. A.S. Model Pembelajaran Dominan Online (Domon) Di Sma Terbuka Kepanjen Dominant Online (Domon) Learning Model at Kepanjen Open Senior High School. *Jurnal Teknodik. Vol 22. No.1, (2018), p. 2.*

³ Girsang.A.P.L et,al. *Statistik Pendidikan 2024*, Badan Pusat Statistik. (2024), p. V.

buta huruf menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Brasil menerapkan berbagai kebijakan dan program strategis guna memperluas akses pendidikan dan menurunkan tingkat buta huruf. Permasalahan ini lebih dominan terjadi di wilayah pedesaan, yang umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta kondisi sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah.⁴

Di Indonesia, persoalan yang sama juga terjadi yaitu tingginya angka putus sekolah. Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 1998/1999 (Balitbang-Depdiknas, 1999), tercatat bahwa dari 2,66 juta lulusan SMP dan MTs, hanya sekitar 1,78 juta siswa (66,9%) yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Artinya, sebanyak 33,1% lulusan tidak melanjutkan pendidikannya. Pada tahun yang sama, masih dari sumber yang sama, jumlah peserta didik yang mengalami putus sekolah di tingkat pendidikan menengah mencapai 243.100 dari total 5.610.000 siswa (9,03%). Jika jumlah lulusan SMP dan MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah digabungkan dengan jumlah peserta didik yang putus sekolah pada tingkat tersebut, maka terdapat sekitar 1.125.000 siswa usia sekolah menengah yang tidak mengikuti atau tidak menyelesaikan pendidikan menengah.

⁴ Amadi, A.S.M. et.al. Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Education: Jurnal Ilmu Kependidikan*. Vol. 18, No 1 Juni, (2023), p. 161-171.

Model pendidikan yang tersedia saat itu dari tahun 1999 sampai tahun 2001-2002 selain belajar formal di sekolah reguler adalah model ujian persamaan. Bagi anak-anak yang tidak belajar di sekolah reguler, dan ingin mendapatkan ijazah maka mereka harus mengikuti ujian persamaan. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) mengembangkan model pendidikan alternatif yang inovatif dan fleksibel. Model ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi lulusan SMP/MTs dan peserta didik yang putus sekolah di jenjang menengah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan, sekaligus memungkinkan mereka untuk bekerja dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Model atau sistem pendidikan yang dimaksudkan adalah SMA Terbuka.

Mengingat tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA serta banyaknya lulusan SMP dan MTs yang tidak melanjutkan pendidikan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) melakukan studi kebutuhan terkait pelaksanaan program SMA Terbuka. Program SMA Terbuka dianggap sebagai model pendidikan yang inovatif dan fleksibel, yang tidak mengharuskan peserta didik hadir secara rutin setiap hari di sekolah. Peserta didik cukup belajar secara mandiri di Tempat Kegiatan Belajar (TKB), yang dapat berupa gedung sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) yang tidak digunakan pada sore hari, pondok pesantren, tempat kerja, Balai Desa, atau lokasi lain yang dekat dengan tempat tinggal siswa.

Pendidikan di Indonesia menghadapi dua dimensi utama yang menjadi tantangan dalam proses pembangunan, yaitu perluasan akses pendidikan dan

pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.⁵ Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia meliputi dua aspek yaitu kualitas pendidikan dan kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan mencakup akses, persebaran sekolah, perbandingan jumlah sekolah dengan penduduk.⁶

Pada tahun 2001/2002 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) berdasarkan hasil studi kelayakan mulai merintis dibentuknya SMA Terbuka di tujuh lokasi dari enam provinsi di Indonesia yang dinilai layak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa banyak siswa putus sekolah di Tingkat SMA serta banyak lulusan SMP dan MTs tidak melanjutkan sekolah.

Ketujuh lokasi yang dipilih untuk perintisan SMA Terbuka meliputi: (1) Kabupaten Bogor di Jawa Barat, (2) Kabupaten Pematang di Jawa Tengah, (3) Kota Surabaya dan (4) Kabupaten Malang di Jawa Timur, (5) Kabupaten Bengkalis di Riau, (6) Kota Samarinda di Kalimantan Timur, serta (7) Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Sebagai tindak lanjut dari hasil studi kelayakan tersebut, sejak tahun 2001 telah dilaksanakan berbagai kegiatan persiapan untuk memulai penyelenggaraan SMA Terbuka di lokasi-lokasi tersebut.

Dalam perkembangannya, sekolah menengah terbuka membuka peluang belajar yang lebih terjangkau dan fleksibel. Para siswa lulusan SMP atau MTs yang ingin belajar namun terbentur terkendala seperti ekonomi, waktu, kondisi

⁵ Hakim, L. Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), (2016), 53–64.

⁶ Wiratama, H. Analisis Persebaran dan Ketersediaan Sekolah Menengah di Kota Tanjungbalai Tahun 2014. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/22138>, (2015)

sosial maupun jarak untuk belajar di sekolah reguler, bisa mengikuti program sekolah terbuka. Sehingga lambat laun, jumlah Sekolah Menengah Atas yang menjadi penyelenggara sekolah terbuka semakin banyak.

Untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pendidikan, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 mulai melaunching SMA terbuka. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, sekolah yang terdaftar sebagai SMA Terbuka berjumlah 625 sekolah baik dari sekolah negeri ataupun swasta. Tujuan dari dibentuknya SMA terbuka di antaranya untuk pemerataan pendidikan di kalangan masyarakat. Sebab pada tahun 2013-2014 Provinsi Jawa Barat belum berhasil dalam hal pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sesuai dengan yang diharapkan.⁷

APK adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, kegunaannya untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase anak yang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia ideal untuk jenjang tersebut. Kegunannya untuk mengetahui jumlah anak yang sekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.⁸

Data tahun 2015–2016 menunjukkan bahwa capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah Provinsi Jawa Barat berada pada angka

⁷ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran Sekolah Menengah Atas Terbuka. (2017).

⁸ BPS. Konsep APS, APK dan APM. (2019).

67,56%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 76,45%. Dengan capaian tersebut, Jawa Barat menempati peringkat kedua terendah secara nasional, setelah Provinsi Papua. Pada tahun ajaran 2016–2017, terjadi peningkatan capaian APK Jawa Barat menjadi 76,62%, sementara angka nasional naik menjadi 81,95%. Meskipun posisinya membaik menjadi peringkat keenam dari bawah, Jawa Barat masih memiliki kesenjangan sebesar 10% dari target APK pendidikan menengah yang telah ditetapkan. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa masih terdapat sekitar 247.067 siswa usia sekolah menengah di Jawa Barat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tersebut.

Menurut data, tahun 2014-2015 sebanyak 703.747 siswa lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), sementara daya tampung sekolah menengah hanya 469.567. Dengan demikian, ada 234.180 siswa yang tidak dapat melanjutkan kependidikan menengah. Guna mengatasi kesenjangan, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan beberapa program unggulan di antaranya pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan unit sekolah baru (USB), sekolah petang dan program Paket C. Namun hasilnya belum maksimal untuk membantu memenuhi target pencapaian APK-APM pendidikan menengah. Ternyata selain ketersediaan sarana prasarana sekolah menengah di Jawa Barat yang belum memiliki daya tampung yang sesuai dengan kebutuhan, ada faktor lain yang menyebabkan angka partisipasi sekolah menengah belum sesuai dengan harapan. Di antaranya, persoalan ekonomi orang tua atau masyarakat dan lokasi

tempat tinggal siswa. Kedua hal ini menjadi kendala secara sosial budaya maupun geografis untuk menjangkau pelayanan pendidikan.

Pada dasarnya, pendidikan terbuka jarak jauh diselenggarakan karena adanya kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan atau pelatihan. Namun, karena keterbatasan jangkauan atau kemampuan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan maka dibuatlah model pendidikan jarak jauh. Secara singkat dapatlah dikemukakan bahwa pada dasarnya gagasan atau inisiatif penyelenggaraan pendidikan terbuka jarak jauh dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan yang ada. Jika kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan atau pelatihan telah dipenuhi oleh lembaga pendidikan atau pelatihan konvensional, maka model pendidikan terbuka jarak jauh tidak diperlukan lagi (fleksibilitas tinggi).

Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka diharapkan dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan akses dan kesempatan bersekolah. Berdasarkan Permendikbud No. 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah terbuka merupakan bentuk satuan pendidikan formal yang secara administratif berada di bawah naungan sekolah induk, dengan penyelenggaraan pembelajaran menggunakan metode belajar mandiri. Program SMA Terbuka merupakan model pendidikan formal jenjang menengah yang dilaksanakan oleh SMA induk melalui pendekatan terbuka, mandiri, dan jarak jauh. Program ini tidak berdiri

sebagai lembaga atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersendiri, melainkan merupakan bagian dari layanan alternatif dalam jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh SMA reguler.

Dengan tujuan mempermudah akses pendidikan dan mempercepat pencapaian APK dan APM nasional, SMA Terbuka diharapkan dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di sekolah menengah. Program SMA Terbuka dikembangkan dari sekolah menengah atas (SMA) reguler yang telah ada, dengan membuka Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di wilayah-wilayah tertentu yang sulit dijangkau oleh sekolah formal konvensional. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan menyediakan pedoman atau petunjuk teknis sebagai acuan operasional yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program SMA Terbuka.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan bahwa di Kabupaten Bekasi model pendidikan SMA Terbuka cukup diminati oleh para praktisi pendidikan. Mereka membuat Tempat Kegiatan Belajar (TKB) untuk dijadikan sebagai sekolah terbuka. Modelnya, TKB yang ada menginduk ke sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai sekolah induk. Teknis atau metode belajarnya karena sifatnya sangat fleksibel sehingga banyak lembaga yang ikut serta menjadi TKB. Ada beberapa keuntungan bagi lembaga yang terdaftar menjadi TKB sekolah terbuka. Di antaranya adalah anak didiknya mendapatkan ijazah resmi yang diakui oleh pemerintah tanpa melakukan ujian persamaan terlebih dahulu. Sehingga selain bisa menjalankan

program yang dijadikan unggulan di lembaga tersebut, juga bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Di sisi lain, keberadaan program SMA Terbuka ternyata juga bisa dijadikan semacam transit bagi lembaga pendidikan yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah reguler entah terbentur perizinan atau kendala lainnya. Sehingga mereka bisa menjadi TKB terlebih dahulu sambil memenuhi unsur-unsur perizinan yang disyaratkan. Dengan model seperti ini proses kegiatan belajar mengajar masih tetap bisa dilakukan secara normal seperti biasa.

Untuk itu, penulis bermaksud melakukan evaluasi pelaksanaan program SMA terbuka di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan model CIPP (context, input, proses dan produk). Model evaluasi CIPP dinilai cukup lengkap karena yang dievaluasi mulai dari masukan atau latar belakang program, proses pelaksanaan program serta hal yang menghambat program, sampai hasil dari program tersebut. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini bisa dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk meninjau keberadaan SMA terbuka. Apakah nantinya akan lebih dikuatkan dengan berbagai pengembangan fasilitas atau sebaliknya.

B. Fokus Penelitian

Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih menghadapi tantangan utama dalam hal perluasan akses, pemerataan kesempatan bersekolah, serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Sejumlah besar masyarakat

Indonesia belum memperoleh layanan pendidikan yang layak akibat berbagai hambatan, seperti kondisi sosial, keterbatasan ekonomi, letak geografis yang terpencil, serta faktor budaya yang memengaruhi partisipasi pendidikan.

Kehadiran SMA Terbuka setidaknya memberikan peluang serta menjadi solusi terhadap persoalan seperti pemerataan akses dan kesempatan sekolah bagi para siswa. Penyelenggaraan Sekolah Terbuka yang baik dan berkualitas dapat menjadi solusi bagi pendidikan baik dari sisi kemudahan akses dan kesempatan sekolah maupun pada kualitas pendidikan itu sendiri. Model pendidikan di SMA Terbuka yang lebih fleksibel dan menekankan pada belajar mandiri memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar lebih banyak, lebih spesifik dan lebih bertanggung jawab. Namun kadang antara konsep dan implementasi di lapangan tidak seirama.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, dan product).

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup dari penyelenggaraan program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi *Context* pada pelaksanaan SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana evaluasi *Input* pada pelaksanaan SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana evaluasi *Proses* pada pelaksanaan SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana evaluasi *Produk* pada pelaksanaan SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil Evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Selain itu juga untuk memberikan masukan dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi. Evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi menjadi penting karena kompleksitas masalah lingkungan dan luasnya wilayah tidak bisa diatasi sendiri baik oleh pemerintah Jawa Barat maupun oleh masing masing sekolah penyelenggara SMA Terbuka.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi menggunakan model CIPP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi dari aspek contexts.

2. Untuk menganalisis evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi dari aspek input.
3. Untuk menganalisis evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi dari aspek proses.
4. Untuk menganalisis evaluasi Program SMA Terbuka di Kabupaten Bekasi dari aspek produk.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya dalam bidang evaluasi program, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang efektivitas dan efisiensi program-program yang dijalankan. Sehingga lembaga yang menjalankan program tersebut bisa lebih terarah dalam melaksanakan programnya dan bisa mendapatkan hasil sesuai seperti yang diharapkan. Hasil penelitian ini, juga diharapkan bisa dijadikan referensi dalam mengembangkan teori-teori yang ada serta dapat memberikan perspektif baru terkait pelaksanaan evaluasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat memberikan tambahan khasanah intelektual yang dapat dijadikan inspirasi dan wawasan bagi para peneliti di masa yang akan datang. Dengan begitu, penelitian ini

berperan penting dalam meningkatkan pemahaman terkait evaluasi program di lembaga pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat:

- a. Bagi para pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.
- b. Bagi pelaksana program, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif demi meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah terbuka.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya di lokasi yang berbeda.